



Saatnya Bergandengan Tangan Mencegah Kejahatan Jalanan

TAJUK

Kasus kejahatan jalanan alias *klithih* menjadi perhatian serius Pemda DIY. Bahkan secara khusus Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerbitkan Surat Edaran (SE) No.050/5082 tentang Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan. Dalam surat edaran ini Sultan meminta seluruh bupati dan wali kota di DIY untuk berperan mencegah terjadinya kejahatan jalanan yang melibatkan remaja, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun rancangan anggaran penanganan. Surat yang ditandatangani Sultan pada Kamis (7/4) ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya peristiwa kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir, dan telah menelan korban jiwa.

Dalam SE ini Sultan meminta bupati dan wali kota untuk melakukan lima langkah penanganan. *Pertama*, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua LPMK, kampung, RW, RT, PKK, karang taruna, dan lainnya lain untuk menyosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga mengetahui keberadaan anggota keluarganya. *Kedua*, menginisiasi aktivitas-aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja. *Ketiga*, menggiatkan patroli lingkungan dengan melibatkan potensi Linmas dan Jagawarga pada lingkungan masing-masing. *Keempat*, bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan *monitoring* terhadap pergerakan kumpulan massa yang masih beraktivitas

hingga lewat tengah malam, dan *kelima* menganggarkan aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dalam APBD masing-masing kabupaten dan kota di DIY. Sultan kembali menegaskan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan jalanan. Raja Ngayogyakarta Hadiningrat ini meminta kepada petugas terkait agar menegakkan hukum kepada pelaku kekerasan jalanan yang beberapa di antaranya sudah ditangkap. Proses hukum harus tetap diberlakukan kepada pelaku meskipun masih di bawah umur. Sejumlah institusi mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan juga perlu memaksimalkan perannya dalam membantu mengatasi

persoalan kejahatan jalanan itu. Para pelaku yang terlibat perlu diperiksa lebih lanjut untuk melihat bagaimana kondisi dan latar belakang keluarganya. Upaya penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan Pemda DIY ini tentu saja harus didukung semua pihak. Semua *stakeholder* mulai dari pemerintah daerah, aparat-kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sekolah, masyarakat dan keluarga harus bahu membahu mengatasi persoalan ini. Dalam persoalan ini, peran masyarakat dan orang tua sangatlah penting untuk mencegah terjadinya *klithih*. Orang tua harus tahu aktivitas anaknya, sekaligus tidak membiarkannya berada di luar rumah pada malam hingga

dini hari. Orang tua juga tak boleh gampang memberikan fasilitas seperti sepeda motor untuk anak yang masih berusia di bawah umur. Sementara, masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi benteng pertama pencegahan kejahatan jalanan, misalnya dengan program jaga warga. Kami yakin penanganan kejahatan jalanan bisa berjalan maksimal jika semua pihak bekerja sama dan saling mendukung. Pemerintah bersama jajaran terkait harus terus bekerja sesuai fungsinya, sementara orang tua harus berperan aktif memantau anak-anak mereka. Selalu awasi dan jangan biarkan anak-anak berada di luar rumah agar terhindar dari kejahatan jalanan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005